

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi seperti ini, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengendalikan stabilitas negara. Pada dasarnya, setiap instansi pemerintah pasti memiliki suatu anggaran, baik APBN maupun APBD. Kebijakan keuangan tersebut sangat berdampak pada kondisi kestabilan suatu daerah / instansi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah wajib mengelola keuangannya dengan baik dan bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan yang dibuat, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berfungsi sebagai alat untuk menyajikan informasi penggunaan dan pengalokasian anggaran yang dikelola oleh instansi pemerintahan (Hatimatunnisani, 2020).

Laporan realisasi anggaran adalah sebuah bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan yang utama. Menurut PP No.71 Tahun 2010 tujuan dari adanya LRA adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas, dan memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. LRA disajikan selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dapat digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah (Nusarifa Tantri & Irmawati, 2018).

Kinerja adalah gambaran seberapa besar tingkat keberhasilan suatu instansi atau perusahaan atas pelaksanaan visi dan misi. Menurut PP No. 8

Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan menyatakan bahwa “Kinerja sektor publik adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Pengukuran kinerja digunakan untuk menentukan apakah program yang direncanakan sudah terealisasi dengan baik, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seberapa efektif dan efisien suatu instansi/daerah dalam menggunakan anggarannya (Lubis, 2021).

Efektivitas dan efisiensi sangat digunakan untuk mengukur atau membandingkan hasil dari *output* dengan *input* yang digunakan dan melibatkan hubungan antara *output* yang diharapkan. Efektivitas merupakan bentuk kontribusi antara pengeluaran dan sesuatu yang ingin dicapai, terutama terkait dengan tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan, efisiensi melibatkan hubungan antara produksi barang atau jasa dan pemanfaatan sumber daya untuk memproduksi barang tersebut (Ulfa, 2018).

Keberhasilan suatu anggaran dapat dinyatakan dengan adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Jika anggaran mengalami surplus atau defisit, maka implementasi dianggap tidak berhasil. Hal ini menimbulkan bahwa terlepas dari efektivitas dan efisiensi, penyerapan anggaran dan realisasi pendapatan harus 100%, sehingga surplus atau defisit dapat dihindari (Murnisari & Purbaningrum, 2022).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Hubungan antara anggaran dan realisasi merupakan gambaran sejauh mana pengambilan keputusan suatu instansi tentang penganggaran dan pendanaan dalam satu tahun anggaran dapat dikatakan efektif dan efisien. Dengan alat ukur yang membantu analisis kinerja anggaran. Menghitung perbedaan yang ada antara anggaran dan realisasinya, yang dinyatakan secara nominal atau presentase berdasarkan laporan realisasi anggaran (Heldawati, 2021).

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diminta untuk memberikan informasi terkait dengan pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Berdasarkan UU No.25 Pasal 3 Tahun 1992, yang berbunyi “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – undang 1945”. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur berperan penting dalam penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah.

Berikut ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017 – 2021 :

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 - 2021

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2017	353.800.000	294.514.059	102.870.783.179	98.876.703.730
2018	339.800.000	236.663.027	84.859.553.618	82.153.297.184
2019	350.000.000	422.680.407	93.403.016.200	89.949.892.857
2020	217.300.000	401.203.731	58.772.999.450	56.696.017.165

2021	355.000.000	305.871.245	77.345.833.700	73.836.514.889
------	-------------	-------------	----------------	----------------

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Dari data laporan realisasi anggaran di atas, dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 -2021 terus mengalami fluktuasi, atau tidak tetap. Kemudian, dari laporan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur masih belum bisa mengelola anggarannya secara maksimal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Heldawati, 2021) berdasarkan penelitian tersebut, selama tahun anggaran 2014–2018, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu berjalan dengan sangat baik, dengan rasio efektivitas rata-rata lebih dari 100%. Dengan menunjukkan penurunan efisiensi yang menandakan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu terbilang cukup efektif dalam pengelolaan APBD sepanjang tahun anggaran 2014–2018. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Ulfa, 2018) menyatakan bahwa tingkat efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan termasuk dalam kategori yang tidak efektif, karena masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan, tingkat efisiensi termasuk dalam kategori yang cukup efisien dalam mengelola anggarannya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2021) temuan studi tersebut menunjukkan bahwa karena tingkat efisiensi pada tahun 2016 dan 2019 berada pada kisaran 80–90%, maka dapat dikatakan cukup efisien.

Sebaliknya, meski rasionya antara 90% dan 100% untuk tahun 2017 dan 2018, kinerja anggaran belanja masih bisa dibilang tidak efisien. Rata-rata belanja operasional sebesar 99,07% dan rata-rata belanja modal sebesar 0,93%, sesuai dengan keselarasan belanja. Hal ini dapat dikatakan kurang baik, karena pemerintah harusnya dapat menyeimbangkan antara kedua belanja tersebut. Pertumbuhan belanja pada tahun 2015 sebesar -5,22%, Dari tahun 2016 ke 2017 meningkat masing-masing sebesar 3,58%, 46,22%, 7,07%, dan -1,24%. Sehingga secara umum pertumbuhan belanja lembaga tersebut dapat dikatakan baik berdasarkan varian pengeluaran dari tahun 2015 hingga 2019.

Ada variasi antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya. Subjek dan tahun penelitian menjadi pertimbangan dalam penelitian Heldawati. Sedangkan kinerja anggaran diteliti secara mendalam pada penelitian Lubis, sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas dan efisiensi untuk mengukur seberapa baik kinerja suatu instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian fenomena serta penelitian terdahulu, akhirnya peneliti menetapkan judul penelitian yaitu: “Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang yang sudah disusun, sebagai berikut:

1. Seberapa besar rasio efektivitas kinerja anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?
2. Seberapa besar rasio efisiensi kinerja anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui rasio efektivitas kinerja anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui rasio efisiensi kinerja anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dapat diberikan kepada berbagai pihak adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Operasional (Praktis)**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan mengenai kebijakan yang akan diambil untuk menetapkan anggaran tahun mendatang dan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur.

#### **b. Manfaat Teoritis**

Diharapkan bisa menjadi pengetahuan baru untuk peneliti terutama dalam hal analisa realisasi anggaran yang ditujukan untuk mengukur

efektivitas serta efisiensi kinerja di Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur. Kemudian, sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis realisasi anggaran untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja.